

Pola Kemitraan Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perkampungan
Budaya Betawi

Oleh :

Laras Ayu Andini (14010110120026)

Pembimbing : Drs. Priyatno Harsasto, MA dan Drs. Turtiantoro, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Cultural tourism can be interpreted as a form of Jakarta City Government responsibility in maintaining the sustainability of the local culture especially Betawi culture. Form of the responsible can be seen from the presence of the Betawi Cultural Village. As an industry, tourism requires the involvement of many actors in its management. The participation of the private and the public are not only seen as a booster in building a sustainable tourism but a fair share roles between government, private sector and community involvement in ensuring each actor to create a good service to the public in the tourism sector.

This study aims to look at the partnership between government, private sector and communities in the management and development of the Betawi Cultural Village area. In this study, researchers used a qualitative research method with deskriptif approach to collecting data through observation, interviews and documentary studies. This research was conducted at the Department of Tourism and Culture of Jakarta and the Betawi Cultural Village. Interviews were conducted with actors involved in the network of partnerships and competent in their respective fields

Partnership is a form of joint research agreement between two or more parties which aim to improve the ability of an organization in achieving its objectives. Based on research showing that partnership is created only in the goverment partnership, which is represented by Culture and Tourism Office of Jakarta with related Institution as a representative of Communities without the active involvement of private sector in the network. The role of private limited through the programs without the involvement of Corporate Social Responsibility in the preparation of regional programs. Lack of actor will weaken the

performance of networking, exchange resources become limited and impact on the lack of innovation and effectiveness of the network in program formulation.

Strengthening the network is necessary to formulate tourism development policy is more sensible and purposeful. However, if the private sector can not be involved in this travel network, community-based tourism development model needs to be applied seriously for optimal results.

A.PENDAHULUAN

Pariwisata sedang menjadi primadona dalam dunia industri dewasa ini, pariwisata akan memberikan wajah baru yang lebih menyenangkan bagi suatu kota. Perlu dicermati hal yang menjadi poin penting dalam peristiwa ini. Pertama, pariwisata telah menjadi sektor yang dipandang dalam perkembangan suatu kota. Pariwisata kini tidak lagi dimaknai sebagai kegiatan yang identik dengan perjalanan untuk tujuan bersenang-senang tetapi telah tumbuh menjadi sebuah industri besar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu kota bahkan negara melalui segala aspek yang terkait dengannya dimana sektor ekonomi dinilai paling banyak terkena dampak positif dari kegiatan pariwisata. Kedua, pariwisata kota telah menjadi sektor andalan untuk menciptakan kehidupan kota yang lebih ramah bagi warganya, pariwisata dirasa dapat membawa pengaruh baru yang positif bagi warga Jakarta yang telah jenuh dengan segala rutinitas padatnya.

Pengembangan pariwisata seperti ini merupakan kewenangan masing-masing daerah untuk menjalankan pembangunan sesuai potensi daerah yang dimiliki. Keuntungan ekonomi secara optimal bisa didapat melalui pengelolaan sektor pariwisata yang terencana dan berkelanjutan. Sektor ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar daerah wisata, menghidupkan usaha-usaha kecil menengah atau rumah tangga, memberikan kontribusi dalam hal penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis dan juga mendatangkan devisa dari para wisatawan mancanegara. Ekonomi mungkin merupakan imbas dari pariwisata yang paling besar manfaat dan keuntungannya. Tetapi ada hal mendasar yang bisa diambil dan menjadi dasar yang potensial untuk pengembangan pariwisata yaitu, menghasilkan penguatan hubungan kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan yang berujung pada kualitas terbaik dari pariwisata berkelanjutan.

Obyek wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan merupakan salah satu kawasan wisata yang menerapkan kemitraan dalam pengembangannya. Perkampungan ini menampilkan suatu kawasan yang dihuni oleh komunitas Betawi untuk mempertahankan keaslian nilai-nilai, norma dan budaya serta membina dan melindungi kelestarian budaya Betawi secara terencana. Namun kemitraan ini menghadapi beberapa masalah terkait kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing aktor. Kendala ini antara lain kurangnya komunikasi antara Lembaga Pengelola dengan beberapa aktor dalam pelaksanaan proyek lapangan, peran swasta yang hanya terbatas pada CSR, hingga usaha keras pemerintah untuk terus menumbuhkan kesadaran wisata masyarakat lokal.

Konsep matang dari perencanaan pariwisata tentu harus didukung oleh kesiapan setiap stakeholder. Pariwisata melibatkan banyak pihak dalam pengelolaannya, menyentuh banyak aspek dan turut membawa unsur-unsur pariwisata untuk terlibat dalam pengembangannya. Kemitraan antar aktor perlu dirancang serta dijalin secara matang dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik di bidang pariwisata.

Harus ada pembagian peran yang adil, sehingga setiap pihak dapat mengambil porsi yang tepat dalam kegiatan pariwisata yang dibangun. Bagaimana membangun fondasi yang kuat antar pihak untuk bekerjasama dalam kepentingan, ide, pandangan dan pengetahuan yang berbeda yang nantinya akan dinegosiasikan dan diterapkan dalam pelaksanaan pariwisata kota. Hal ini lah yang perlu ditemukan dan dijalin oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dengan industri pariwisata dalam rangka menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan untuk Jakarta ke depan khususnya pengembangan Setu Babakan sebagai kawasan wisata budaya, program yang bagus tidak serta merta langsung menjadikan Jakarta sebagai kota favorit tujuan wisata tetapi adanya kesiapan dan kesediaan dari berbagai pihak dalam menyediakan infrastruktur dan layanan yang baik yang perlahan akan menumbuhkan citra positif Jakarta sebagai kota wisata dengan kualitas dunia.

Dari adanya latar belakang tersebut, muncul pertanyaan tentang Siapa saja *stakeholder* pariwisata yang terlibat dalam proses pengembangan dan pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi ? Bagaimana bentuk kemitraan yang dijalankan oleh *stakeholders* dalam pengelolaan dan pengembangan Perkampungan Budaya Betawi demi mewujudkan pariwisata kota yang berkualitas ?

Sehingga tujuan dari adanya penelitian ini adalah Untuk menemukan dan menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam domain kebijakan pariwisata di Perkampungan Budaya Betawi sehingga dapat diuraikan peran-peran mereka dalam jaringan pariwisata ini. Untuk menganalisis dan menguji pola jejaring kemitraan antara dua pihak atau lebih aktor pariwisata dalam mengelola dan mengembangkan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan sehingga dapat dijelaskan model-model kemitraan yang dianut dan menilai keberlanjutan kerjasama ini.

Penelitian skripsi ini berupaya untuk mengkaji bagaimana pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi dijalankan oleh berbagai aktor. Teori Networking digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis bagaimana pola hubungan antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam lingkaran kerjasama pariwisata budaya berjalan. Apakah kemitraan yang dibangun dapat memberikan good service bagi publik ? dan bisakah kemitraan ini mewartakan tujuan dari keterlibatan masing-masing pemangku kepentingan dalam pengembangan Perkampungan Budaya Betawi?. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala yang telah terjadi dan menganalisis gejala tersebut melalui prosedur penelitian kualitatif.

B. PEMBAHASAN

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan semakin menguatkan posisi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi kepunahan budaya Betawi. Dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan, pasal 1 ayat 6 tercantum definisi mengenai Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Bunyi pasal tersebut yaitu :

“Perkampungan Budaya Betawi sebagai suatu kawasan di Jakarta dengan komunitas yang ditumbuhkembangkan budaya Betawi yang meliputi seluruh hasil gagasan dan karya baik fisik maupun non fisik yaitu kesenian, adat istiadat, folklor kesatraan dan kebahasaan, kesejarahan serta bangunan yang bercirikan kebetawian”

Kawasan yang ditetapkan sebagai perkampungan Betawi ini terletak dibilangan Srengseng Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan memiliki luas kurang lebih 289 ha (dua ratus delapan puluh sembilan hektar). Dari hasil studi dokumentasi (Laporan Perkampungan Budaya Betawi sebagai Daya Tarik Wisata 2012) pada awalnya tempat yang ditunjuk oleh Tokoh dan Masyarakat Betawi sebagai kawasan cagar budaya adalah daerah Condet Jakarta Timur, tetapi hal ini tidak pernah terealisasi karena keterbatasan lahan. Nama Setu Babakan berasal dari kondisi kampung yang memiliki Situ dan berdekatan dengan Kampung Babakan. Dalam sejarah Perkampungan Budaya Betawi, Kampung Setu Babakan merupakan kawasan yang sudah direncanakan oleh pemerintahan Gubernur Ali Sadikin untuk menjadi daerah Cagar Budaya bersama dengan daerah Condet. Ketika itu kawasan Kampung Setu Babakan sering mengadakan acara “Ngubek Setu” dan acara lomba menangkap ikan untuk memperebutkan hadiah televisi atau radio serta pertunjukan budaya Betawi berupa Tari Topeng atau Gambang Kromong.

Kini Perkampungan Betawi ini dikelola secara terpadu yang meliputi kawasan pemukiman, fasilitas rekreasi, hutan kota, daerah resapan air melalui Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong. Sebagai pemukiman, kawasan Perkampungan Budaya Betawi terletak di kelurahan Srengseng Sawah kecamatan Jagakarsa yang memiliki jumlah penduduk sebesar 60936 jiwa berdasarkan data yang dihimpun tahun 2010. Perkampungan Budaya Betawi ini meliputi 3 Rukun Warga (RW) yaitu RW 06, 07 dan 08.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Jagakarsa 2010

Nama Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Rasio
Cipedak	19692	18869	38561	104.36
Srengseng Sawah	31242	29694	60936	105.21
Ciganjur	20058	19170	39228	104.63
Jagakarsa	35523	34192	69715	103.89
Lenteng Agung	30728	29007	59735	105.93
Tanjung Barat	21100	20945	42045	100.74

Sumber : Laporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

B.1 Perkampungan Budaya Betawi Sebagai Obyek Wisata

Dalam Perkampungan Budaya Betawi, aset pariwisata tidak hanya dimiliki oleh Pemerintah, tetapi masih ada sebagian lahan yang berstatus milik masyarakat sekitar Setu Babakan. Beberapa properti yang menjadi milik Pemerintah antara lain gedung pengelola, mushola, galeri dan sejumlah lahan yang di Zona A, Zona B dan Zona C yang sedang mengalami perbaikan dan pembangunan gedung-gedung baru.

1. Pemerintah memiliki lahan sekaligus properti berupa sejumlah gedung di kawasan ini yang kemudian diserahkan kepada Lembaga Pengelola untuk dapat di daya gunakan sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Perkampungan Budaya Betawi.
2. Pemerintah menyewa sejumlah aset masyarakat berupa tanah dengan sistem yang disetujui oleh masing-masing pihak dalam perjanjian untuk kemudian didirikan sejumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata budaya dengan pengelolaan di lapangan dikembalikan kepada Lembaga Pengelola.

Secara syarat, Perkampungan Budaya Betawi telah memiliki kesiapan untuk berkembang menjadi obyek wisata perkotaan. Sebagai jualan utama, wisata budaya mempunyai daya tarik tersendiri dalam hal atraksi kesenian, acara adat dan nilai-nilai keseharian yang masih dilestarikan oleh masyarakat lokal. Kemudahan akses untuk mencapai daerah wisata didukung oleh moda transportasi umum yang banyak melewati jalur Srengseng Sawah. Selama ini yang menjadi keprihatinan adalah kurangnya sarana penunjang pariwisata seperti toilet umum, bangku-bangku taman, dan penataan wilayah yang terkesan masih ala kadarnya. Fasilitas yang sudah tersedia dalam kawasan terdiri dari , wisma betawi, rumah adat, panggung terbuka, kantor pengelola, pintu gerbang, masjid, rehabilitasi rumah penduduk, gallery, toilet umum, lahan parkir dan sejumlah bangku taman.

Tabel 3.3

Jumlah Pengunjung Perkampungan Budaya Betawi Tahun 2013

NO	TAHUN	LOKAL			ASING			JML.
		Mahasiswa dan Pelajar	LSM, Lembaga Pemerintah	Masyarakat Umum	Mahasiswa dan Pelajar	LSM, Lembaga Pemerintah	Masyarakat Umum	
1	2005	6.643	1.109	81.964	8	12	179	98.834

2	2006	10.939	11.642	75.901	20	25	186	98.713
3	2007	12.727	15.167	106.610	15	10	56	134.575
4	2008	11.175	10.577	111.736	79	49	40	133.656
5	2009	9.389	7.836	118.292	208	17	60	135.811
6	2010	8.852	9.255	106.911	6	5	39	125.068
7	2011	10.683	10.163	125.271	40	3	55	146.215
8	2012	12.926	9.558	171.541	18	1	52	194.096
9	2013	11.023	12.587	176.041	107	10	21	199.789

Sumber : Laporan Pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi Tahun 2013

Pemerintah bersama Lembaga Pengelola memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan ini. Dua aktor ini bekerja untuk membangun hubungan jejaring yang kuat dalam hal, pemasaran, pemeliharaan, hingga pendanaan. Anggaran bagi Perkampungan Budaya Betawi berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan topoksi. Kawasan ini mendapat anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk tahun 2014, dan Rp 700.000.000.000,- untuk tahun anggaran 2013.

Terkait dalam hal finansial, Kawasan ini belum memberikan retribusi ke kas daerah. Tiket masuk atau lebih tepat disebut tiket parkir Perkampungan Budaya Betawi sebesar Rp 2000,- hanya ditarik bagi pengunjung yang membawa kendaraan bermotor. Pengelolaan uang parkir tersebut diatur oleh Gerakan Sosial Masyarakat Betawi, karena petugas dari gerakan tersebut tidak sepenuhnya digaji oleh Pemerintah melalui APBD. Pemasukan karcis tersebut akan dikelola untuk biaya operasional kebersihan, pendapatan untuk petugas sendiri hingga kas untuk membantu kegiatan-kegiatan masyarakat lokal di sekitar kawasan.

B.2 Identifikasi Aktor Dalam Jejaring Pariwisata Perkampungan Budaya Betawi

Jaringan Pemerintah dalam pariwisata Setu Babakan terdiri dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta beserta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemakaman dan Pertamanan serta Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dimaknai sebagai pemimpin jaringan. Pemaknaan ini bisa dilihat dari kekuasaan untuk memutuskan kebijakan, pemfasilitasan dana, aktor sentral dalam

koordinasi yang memungkinkan terjadinya kolaborasi dalam jaringan, fungsi kepemimpinan juga dilihat oleh pemerintah. Kedua, ranah dalam jaringan ini adalah pariwisata, pengetahuan dan kekuasaan terbesar terletak pada Dinas ini tanpa melepas koordinasi dengan perangkat kerja lain.

Aktor kedua adalah masyarakat beserta komunitas pariwisata dan budaya. Masyarakat dalam konteks pariwisata bisa mencakup masyarakat lokal yang terdiri dari tokoh adat, intelektual, dan budayawan. Individu ini membentuk jaringan organisasi pariwisata lokal dengan nama Lembaga Pengelola yang mempunyai legalitas hukum. Pembentukan organisasi pariwisata ini berperan sebagai konsultan pemerintah dalam jaringan, pertukaran informasi mengenai kondisi lapangan pemerintah dapatkan melalui Lembaga Pengelola. Organisasi ini layak diisi oleh individu-individu dengan keahlian dibidang pariwisata budaya yang luas dan kemampuan melobi yang tinggi. Kekuasaan untuk melakukan lobi-lobi kepada pemerintah terletak pada jaringan ini dalam upaya peningkatan pariwisata. Dari hasil Penelitian, Lembaga Pengelola ini dibentuk menjadi suatu lembaga kepengurusan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2007 tentang Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Jaringan masyarakat juga melibatkan pelaku industri dan peran serta sanggar dalam pemberdayaan masyarakat. Kemitraan ini melibatkan campur tangan banyak pihak sebagai stakeholder yang turut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kawasan budaya.

B.3 Efektivitas Jaringan

Salah satu kendala mengapa Perkampungan Budaya Betawi ini terlihat lamban dalam pengembangan adalah kurangnya jejaring yang membatasi kemampuan inovasi sehingga menyebabkan terhambatnya pengembangan kawasan ini. Keragaman aktor yang terlibat dalam jaringan hanya terdiri dari pemerintah dan masyarakat. Semakin sedikit jumlah aktor yang terlibat semakin banyak fokus pekerjaan yang harus ditangani. Akhirnya kesempatan bagi kawasan ini untuk berkembang berjalan lambat. Padahal desain pembangunan kawasan budaya tentu bermaksud pada keberlangsungan kawasan ini di masa depan, pengembangan pariwisata yang dilakukan secara arif dengan mempertahankan budaya dan kelestarian lingkungan.

Dalam kasus ini posisi swasta dalam jaringan menjadi hilang. Nampaknya kedudukan swasta belum dianggap penting sehingga swasta tidak dilibatkan dalam segala keputusan kebijakan mengenai kawasan budaya. Posisi tawar yang lemah didapat swasta dalam jejaring pariwisata. Kepadatan jaringan masih renggang dengan banyaknya aktor yang hilang dalam interaksi. Secara teori hal-hal seperti ini akan berujung pada kurangnya pertukaran sumber daya, jaringan akan menghadapi banyak kendala dalam menjawab sejumlah tuntutan dalam pengembangan kawasan. Efektivitas dan efisiensi yang seharusnya didapat dengan berbagi peran tanggungjawab menjadi kecil terjadi, kerjasama pun menurun.

Pemerintah tidak berbuat banyak dalam menjawab tantangan ini, campur tangan swasta hanya terjadi dalam skala *Corporate Social Responsibility (CSR)*, bentuk CSR dari berbagi perusahaan terwujud dalam berbagai program kemanusiaan dengan tujuan untuk membantu pengembangan kawasan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata budaya.

B.4 Lingkungan Budaya Masyarakat Dalam Jejaring

Pengembangan kawasan pada dasarnya harus melihat pada daya dukung lingkungan yang ada. Umumnya pekerja pada sejumlah objek wisata di kawasan ini berasal dari warga kampung Betawi sendiri yang diberdayakan oleh Lembaga Pengelola untuk mengurus sejumlah sarana pariwisata. Mereka bukan pekerja profesional di bidang pariwisata dan hanya mengandalkan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas dalam membantu pengembangan walaupun kesadaran masyarakat akan kawasan wisata telah membuka sejumlah industri rumahan seperti pembuatan dodol dan bir peletok tumbuh subur, pelaku industri kuliner juga berlomba menyajikan masakan khas Betawi untuk menarik perhatian wisatawan. Meskipun masyarakat dilibatkan dalam jejaring, keterlibatan mereka cenderung rendah dalam jaringan ini.

Beberapa pedagang kuliner dalam lingkungan kawasan ini mendapat bantuan fasilitas gerobak yang berasal dari Dinas UMKM, tetapi penerimaan gerobak ini hanya terbatas kepada para pedagang yang beridentitas Jakarta dan berdomisili di sekitar kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

B.5 Organisasi dan Komunitas Dalam Pariwisata Lokal

Kelompok komunitas dalam Perkampungan Budaya Betawi ini terdiri dari :

- Kelompok Pariwisata Lokal :
 - o Lembaga Kebudayaan Betawi
 - o Kelompok Sadar Wisata Setu Babakan
 - o Gerakan Sosial Masyarakat Betawi
 - o Sanggar
- Kelompok Pelaku Industri :
 - o Pedagang kaki lima
 - o Penjual cinderamata
 - o Pemilik homestay

Kelompok-kelompok tersebut lebih berperan sebagai pendukung dalam proses pengembangan kawasan, kelompok-kelompok penekan atau yang *concern* terhadap isu-isu sosial dalam lingkungan kawasan telah ada tetapi relatif kecil kinerjanya, sementara selama ini penyeimbang utama pemerintah dalam jaringan ini masih dipegang oleh Lembaga Pengelola. Komunitas Pariwisata Lokal ini bergerak dalam mendukung kebijakan-kebijakan dan kegiatan penunjang dalam pariwisata. Lembaga Kebudayaan Betawi merupakan salah satu inisiator dari lahirnya Perkampungan Budaya Betawi, *concern* mereka dalam pariwisata ini ditunjang oleh peserta komunitas lain yang jelas peran dan tanggung jawabnya. Tiga peserta lain lebih berfokus pada pelaksanaan program yang bersifat teknis di lapangan.

B.6 Orientasi Komersial

Penjelasan tentang orientasi komersial dalam Perkampungan Budaya Betawi dapat ditemukan dengan melihat sejauh mana pelibatan swasta dalam hal investasi terjadi. Pertama swasta hanya menunjukkan dirinya melalui program CSR, artinya investasi yang dilakukan kecil bahkan tidak mempunyai arti apa-apa bagi swasta itu sendiri. Berbeda halnya bila swasta berinvestasi modal dalam jumlah yang besar, mereka akan mendapat keuntungan tertentu yang setara dan berjangka panjang sehingga orientasi kinerja mereka cenderung lebih tinggi dan fokus dalam jaringan.

Kedua, hampir semua pembiayaan kawasan ini berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas, saat pemerintah harus membiayai

sendiri dari hampir keseluruhan proyek publik, keterbatasan dana yang dimiliki akan memperlambat pengembangan kawasan, dana terbatas sehingga kinerja jaringan redah. Bila pemerintah berharap terhadap dukungan swasta, swasta pun berharap terhadap sikap pemerintah dalam sisi kebijakan yang bisa memperlancar urusan mereka dalam domain pariwisata ini. Swasta mengharapkan umpan balik yang diperoleh selama terlibat dalam jaringan.

Perkampungan Budaya Betawi memang tidak didesain sebagai destinasi pariwisata yang konsen pada profit sebesar-besarnya. Pengembangan kawasan tidak diciptakan sebagai ladang bisnis yang potensial walaupun keuntungan secara finansial tetap diharapkan sebagai modal selama tidak merusak tatanan budaya dan sosial yang telah tertanam dalam lingkungan.

C. PENUTUP

C.1 Kesimpulan

Tanggung jawab Pemerintah Kota Jakarta terhadap kelestarian budaya lokal melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan diwujudkan dalam berbagai program wisata dan kebijakan penetapan sejumlah kawasan cagar budaya. Kebijakan tersebut meliputi perbaikan sejumlah bangunan kawasan cagar budaya, menghidupkan kembali bangunan-bangunan kuno, menetapkan sejumlah kawasan sebagai daerah cagar budaya hingga memperbaiki manajemen pengelolaan pariwisata budaya dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan wisata yang beredukasi tinggi serta mewujudkan tata kelola pariwisata yang terencana dan berkelanjutan. Sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab tersebut, maka pada tahun 2005 Pemerintah Jakarta menetapkan kebijakan Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa sebagai Kawasan Perkampungan Budaya Betawi guna melindungi tata kehidupan dan nilai-nilai Budaya Betawi di tengah gempuran modernitas kota. Bentuk kebijakan terhadap budaya lokal tersebut belum mampu di pahami secara sungguh pelaksanaannya oleh beberapa pihak termasuk pemerintah. Belumnya terciptanya kemitraan yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam membangun kawasan ini. Peran swasta bahkan hilang dalam jejaring pariwisata, sehingga bentuk pertukaran interaksi hanya mengandalkan pada kapabilitas pemerintah dan Lembaga Pengelola sebagai mitra yang terdiri dari elemen masyarakat. Kemampuan inovasi terhambat sehingga pengembangan kawasan ini terlihat lamban.

Ada beberapa hal yang menyebabkan swasta tidak terlibat secara utuh dalam jaringan pariwisata ini. Pertama, regulasi dan kondisi yang belum memungkinkan pihak swasta untuk bergabung secara tetap. Disini peran pemerintah terlalu menonjol terlihat dari otoritasnya yang lebih besar dalam jaringan. Kedua, persamaan konsep pengembangan kawasan budaya yang terkadang sulit disamakan dengan pihak swasta.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah dan membutuhkan bimbingan pemerintah secara terus-menerus akan mempengaruhi kelangsungan pengembangan kawasan budaya ini kedepannya. Hambatan-Hambatan ini tentu akan mempengaruhi efektivitas kerja dalam jejaring dan kondisi lingkungan sosial yang kurang kondusif untuk terbentuknya kawasan pariwisata budaya yang berkelanjutan.

Hambatan dalam kemitraan jaringan lebih disebabkan pada kurangnya komunikasi yang rutin antara Pemerintah dengan Lembaga Pengelola. Hal ini dibuktikan oleh beberapa program pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri dan sporadis. Perkampungan Budaya Betawi mengalami sejumlah kendala dalam proses pengembangannya. Hal ini sangat disayangkan mengingat kawasan ini sangat menjanjikan untuk ditumbuh kembangkan menjadi kawasan wisata edukasi yang mampu menjangkau wisatawan dari semua kalangan.

C.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini kepada Pemerintah Kota Jakarta dan Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi adalah: Pemerintah dan Lembaga Pengelola dapat merumuskan kebijakan pembangunan kawasan yang lebih terarah dengan penguatan jaringan. Sebagai kawasan publik penguatan tiga pilar utama dalam industri pariwisata pemerintah, swasta dan masyarakat akan semakin memperkuat pelaksanaan program pembangunan. Penguatan ini yang akan berdampak positif pada inovasi, efisiensi dan efektifitas kerja jejaring. Bila swasta belum dianggap tepat untuk masuk dalam lingkup jaringan pariwisata, penguatan peran antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menumbuh kembangkan kawasan budaya secara optimal. Perlu diterapkan model pengembangan pariwisata yang secara konkrit berbasis pada partisipasi masyarakat lokal. Dominasi pemerintah perlu ditekan untuk menumbuhkan rasa mandiri dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan wisata. Perlu ada public hearing atau forum diskusi rutin yang mewadahi semua aktor untuk dapat menyalurkan ide-ide, pandangan serta sikap sehingga ego sektoral setiap

aktor dalam pelaksanaan kebijakan dapat ditekan. Bentuk Masterplan induk tentang arahan pembangunan kawasan Perkampungan Budaya Betawi, Hal ini untuk memastikan agar semua proyek-proyek kerja dapat dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaannya sehingga semua pembangunan dapat diukur keberhasilannya dan dapat menilai keberlanjutan jejaring dalam pariwisata ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Damanik, Janianton dan Helmut F. Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori Keaplikasi*. Yogyakarta. Puspar UGM dan Andi Yogya
- Hamalik, Oemar. 1978. *Travel & Tour Asas Metode Teknik*. Jakarta. Pradnya Paramita
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta. UII Press
- J, Muljadi. 2010. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta. RajaGrafindo Persada
- Kotler, Philip dkk. 1999. *Pemasaran Perhotelan dan Kepariwisata Edisi Kedua*. Jakarta. Prenhallindo
- Pitana, I Gde dan Gayatri Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Jakarta. Andi
- Sari, Suzanna Ratih. 2004. *Peran Pariwisata dalam Pembangunan*. Semarang. UNDIP
- Soekadijo, R. G. 1997. *Anatomi Pariwisata, Memahami Pariwisata sebagai Sistem Linkage*. Jakarta. Gramedia
- Spillane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta. Kanisius
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gava Media
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta. Andi

Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang. UNDIP

Yoeti, Oka A. 2008. *Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Jakarta. Kompas

Jurnal :

Mualisin, Isnaini. (2007). “*Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta*”. Jurnal Penelitian BAPPEDA Kota Yogyakarta. (2). 5-23

Narelle Beaumont and Dianne Dredge. (2010). *Local Tourism Government : A comparison of three network approaches*. Journal of Sustainable Tourism. School of Management and Marketing, Faculty of Business, University of Southern Queensland, Springfiled, School of Tourism and Hospitality Management, Southern Cross University, Tweed Heads. 18 (1). 7-28

Seldjan Timur. *Analyzing Urban Tourism Stakeholder Relationship: A Network Perspective*. Hayaske School of Business University of Calgary, Canada